



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
11. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
13. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
29. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 5

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan rumus:
$$\text{Nilai Jual Sarang Burung Walet} = (\text{Harga Pasaran Umum} \times \text{Volume Produksi}).$$

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 7

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak yang masih berlaku;
 - b. surat izin usaha (apabila ada);
 - c. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan; dan
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran Objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.
- (9) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (10) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Formulir Data Objek Pajak tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dan/atau melalui pembayaran tunai menggunakan kode bayar.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (6) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir SSPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembukuan

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan dan disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (6) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir SPTPD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa, meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit, meliputi:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (8) Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik atau kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 17

Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 18

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir SKPDKB, SKPKBT, SKPDN dan SKPDLB tercantum dalam Lampiran V sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Surat Tagihan Pajak

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir STPD tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Penagihan Pajak

Pasal 20

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (5) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (6) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 22

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tindakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sudah dilaksanakan namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Bapenda dapat melakukan upaya Penagihan lain.

- (2) Upaya Penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemanggilan Wajib Pajak; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah teguran disampaikan.
- (4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan didampingi instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten apabila diperlukan.
- (5) Upaya Penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah teguran ketiga diterima oleh Wajib Pajak.
- (6) Penagihan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan Penagihan Pajak.

Bagian Kesepuluh
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kesebelas
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Kabupaten.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Penghapusan Piutang Pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan Penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Kedua Belas
Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 27

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Belas Banding

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak dikenakan.

- (4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat Belas Gugatan

Pasal 31

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SERTA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bapenda dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - c. membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan/atau

- d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak ketetapan Pajak terutang diterbitkan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui suatu keputusan yang penetapannya dilakukan oleh:
 - a. Bupati melalui Kepala Bapenda dengan nilai pajak terutang paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Bupati dengan nilai pajak terutang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diajukan atas sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang.
- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
- (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;

- b. wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
 - c. wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.
- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan penghapusan sanksi administratif.
 - (7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas.
- (2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - c. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan permohonan; dan
 - d. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan:
 - a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan perubahan;
 - b. fotokopi NPWP Badan;
 - c. fotokopi kartu identitas pemohon;
 - d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - e. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan permohonan; dan
 - f. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak dapat diajukan terhadap sanksi administratif yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya dapat diajukan dalam hal ketetapan atau tagihan Pajak Daerah tersebut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

- c. tidak diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan; dan/atau
 - d. diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan, tetapi permohonan ditolak.
- (6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dimaksud sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 35

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam melaksanakan Penelitian, Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 37

- (1) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Ketiga

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 38

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. kondisi objek pajak;
 - b. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila:
 - a. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak atau terdapat objek ganda; dan/atau
 - b. ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan huruf c yang diajukan kepada Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak apabila diajukan perorangan;
 - b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang diajukan permohonan; dan
 - e. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan:
 - a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan perubahan;
 - b. fotokopi NPWP Badan;
 - c. fotokopi kartu identitas pemohon;
 - d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - e. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonan; dan
 - f. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 40

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 41

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati melalui Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan dan pembatalan secara jabatan, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat menunjuk tim untuk membantu pelaksanaan Penelitian.

- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat:
 - a. meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan; dan/atau
 - b. menugaskan tim untuk melakukan peninjauan lapangan.
- (5) Hasil Penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Keempat Kemudahan Perpajakan

Pasal 43

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang ditandatangani Wajib Pajak dan disetujui Camat atau dokumen resmi lain yang menyatakan terjadinya keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.
- (8) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas untuk dapat memenuhi kewajiban utang lancar pada tahun berkenaan dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 44

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak terutang, jangka waktu penundaan atau masa angsuran, dan alasan yang jelas disertai dengan dokumen pendukung alasan tersebut.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) tidak dapat diajukan terhadap pajak terutang yang terbit akibat dari pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 45

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (5), Kepala Bapenda melakukan Penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 47

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima lengkap.
- (2) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VI

PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pasal 49

- (1) Bapenda dapat menerima pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan Pajak Sarang Burung Walet dari masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengaduan, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. kotak saran/kotak pengaduan; dan
 - b. media teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII

SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 50

- (1) Bapenda dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyuluhan;
 - b. seminar; atau
 - c. sosialisasi penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media cetak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Merdeka KM. 10, Kelurahan Harau Mulya, Kecamatan Talang Ubi	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH TAHUN 20.....	Nomor Formulir

DATA WAJIB PAJAK		
JENIS WAJIB PAJAK	☐ WP PRIBADI ☐ WP BADAN	
1. Nama Wajib Pajak	:	
2. NPWP Usaha	:	
3. Alamat	:	
- Dusun/Jalan	:	
- RT/RW	:	
- Desa/Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten/Kota	:	
- Kode Pos	:	
- Nomor Telepon/HP	:	
- E-mail	:	
4. NIB/Surat Izin yang Dimiliki *) apabila ada	:	
Jenis Izin	No. Tgl.	
5. Jenis Pajak	:	
☐ Pajak MBLB	☐ Pajak Reklame	☐ Pajak Air Tanah
☐ Opsen PKB	☐ Opsen BBNKB	☐ Pajak Sarang Burung Walet
☐ PBJT Makanan/Minuman	☐ PBJT Jasa Parkir	☐ PBJT Tenaga Listrik
☐ PBJT Jasa Kesenian/Hiburan		☐ PBJT Jasa Perhotelan

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
1. Nama Pemilik / Pengelola	:
2. Jabatan	:
3. NIK	:
4. NPWP Pribadi	:
5. Alamat Tempat Tinggal	:
- Dusun/Jalan	:
- RT/RW	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kota	:
- Kode Pos	:
- Nomor Telepon/HP	:
- E-mail	:
Talang Ubi, 20.....	
Wajib Pajak/Pengelola/Kuasa,	

Ket: - Harap diisi dengan huruf KAPITAL
- Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
dto
HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

DATA OBJEK PAJAK

	BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	DATA OBJEK PAJAK SARANG BURUNG WALET		Nomor:													
				<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK																	
A. NAMA OBJEK PAJAK : _____																	
B. ALAMAT OBJEK PAJAK : _____																	
Desa/Kelurahan : _____																	
Kecamatan : _____																	
C. NAMA WAJIB PAJAK : _____																	
D. ALAMAT WAJIB PAJAK : _____																	
B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK																	
STATUS HAK TANAH & LUAS BANGUNAN																	
<table border="1"><tr><td>A. Status Hak Tanah</td><td>:</td><td>Milik Sendiri / Sewa / Kontrak / Lainnya*)</td></tr><tr><td>B. Luas Tanah</td><td>:</td><td>M²</td></tr><tr><td>C. Luas Bangunan</td><td>:</td><td>M²</td></tr></table>						A. Status Hak Tanah	:	Milik Sendiri / Sewa / Kontrak / Lainnya*)	B. Luas Tanah	:	M ²	C. Luas Bangunan	:	M ²			
A. Status Hak Tanah	:	Milik Sendiri / Sewa / Kontrak / Lainnya*)															
B. Luas Tanah	:	M ²															
C. Luas Bangunan	:	M ²															
JUMLAH SARANG BURUNG WALET : Sarang																	
JUMLAH PRODUKSI																	
<table border="1"><tr><td>Triwulan I</td><td>:</td><td>Kg</td></tr><tr><td>Triwulan II</td><td>:</td><td>Kg</td></tr><tr><td>Triwulan III</td><td>:</td><td>Kg</td></tr><tr><td>Triwulan IV</td><td>:</td><td>Kg</td></tr></table>						Triwulan I	:	Kg	Triwulan II	:	Kg	Triwulan III	:	Kg	Triwulan IV	:	Kg
Triwulan I	:	Kg															
Triwulan II	:	Kg															
Triwulan III	:	Kg															
Triwulan IV	:	Kg															
JUMLAH OMSET																	
<table border="1"><tr><td>Triwulan I</td><td>:</td><td>Rp</td></tr><tr><td>Triwulan II</td><td>:</td><td>Rp</td></tr><tr><td>Triwulan III</td><td>:</td><td>Rp</td></tr><tr><td>Triwulan IV</td><td>:</td><td>Rp</td></tr></table>						Triwulan I	:	Rp	Triwulan II	:	Rp	Triwulan III	:	Rp	Triwulan IV	:	Rp
Triwulan I	:	Rp															
Triwulan II	:	Rp															
Triwulan III	:	Rp															
Triwulan IV	:	Rp															
JUMLAH TENAGA KERJA : _____																	
Petugas,				.Talang Ubi,,20													
NIP _____				Wajib Pajak/Subjek Pajak													
_____				_____													

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SSPD

 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka KM 10 Kel.Handayani Kec.Talang Ubi PALI - SUMATERA SELATAN 31211		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN : Nomor : Tanggal :	
Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : Masa Pajak : Tahun : Cara Pembayaran : ☐ Tunai ☐ Bank Bank Penerima Setoran : No. Rek : Tipe dan Jenis Pajak : Kode Bayar : Keterangan : Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)
Sanksi			
Denda			
Jumlah			
Terbilang :		(KETERANGAN)	
Bendahara Penerimaan	BANK SUMSELBABEL	Petugas Pemungut	PALI, 20.. Penyetor
NIP.		NIP.	
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank		Pembayaran dapat dilakukan melalui BANK SUMSELBABEL terdekat	
Jatuh Tempo : (Tanggal) Sanksi 1% per bulan maksimal 24 bulan			

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET Tahun Pajak : 20...	Nomor SPTPD : Masa Pajak :
N.P.W.P.D : No. Telp. :		Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah kabupaten Penukal abab lematang ilir di PALI
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.		
A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK		
A. NAMA OBJEK PAJAK : B. ALAMAT OBJEK PAJAK : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Telepon : - C. NAMA WAJIB PAJAK : D. ALAMAT WAJIB PAJAK : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Telepon :		
B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK		
a. Pembayaran Pemakaian Rp. b. Pembayaran lain-lain Rp. c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. d. Pembayaran Terutang (10.00% x DPP) Rp. e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp. f. Sanksi Administrasi Telat Lapor (0%) Rp. g. Jumlah Pajak yang dibayar Rp. h. Data Pendukung a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak Ada b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet ☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak Ada c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill ☐ 1. Ada / ☐ 2. Tidak Ada		
C. PERNYATAAN		
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Talang Ubi, 20... Wajib Pajak		
D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA		
Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP. : Tandatangan : (.....)		

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SKPDKB



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Nomor :
Masa/Tahun Pajak :

Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Keterangan :

NPWPD :
NOPD :

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -
		Jumlah	Rp -

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar

Rp -

2. Sanksi Administrasi

a. Bunga Pasal 77 ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan.

Rp -

b. Bunga Pasal 77 ayat (2) berdasarkan hasil perhitungan secara jabatan karena tidak melakukan pelaporan SPTPD.

Rp -

c. Bunga Pasal 77 ayat (2) berdasarkan hasil perhitungan secara jabatan karena tidak melakukan kewajiban pencatatan/ pembukuan

Rp -

d. Bunga Pasal 77 ayat (2) berdasarkan hasil perhitungan secara jabatan karena tidak memberikan dokumen, keterangan, dan kesempatan untuk memasuki tempat dalam rangka pemeriksaan.

Rp -

e. Kenaikan Pasal 77 ayat (2) untuk jenis pajak BPHTB, PBJT, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Rp -

f. Kenaikan Pasal 77 ayat (2) untuk jenis pajak PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Rp -

g. Jumlah Sanksi Administrasi

Rp -

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)

Rp -

Dengan Huruf :

PERHATIAN :
Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penandatanganan

Nama Jabatan Penandatanganan
NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir																														
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN Nomor : Tanggal Penerbitan : Masa Pajak/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :																															
Nama Wajib Pajak : NPWPD : Alamat : NOPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Keterangan :																															
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Jenis Pajak :																															
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi berupa kenaikan pasal 77 ayat (3)</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)</td><td>Rp</td><td>-</td></tr></table> Dengan Huruf :		1. Dasar Pengenaan	Rp	-	2. Pajak yang terhutang	Rp	-	3. Kredit Pajak			a. Setoran yang dilakukan	Rp	-	b. Lain-lain	Rp	-	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp	-	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)	Rp	-	5. Sanksi Administrasi berupa kenaikan pasal 77 ayat (3)	Rp	-	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)	Rp	-
1. Dasar Pengenaan	Rp	-																													
2. Pajak yang terhutang	Rp	-																													
3. Kredit Pajak																															
a. Setoran yang dilakukan	Rp	-																													
b. Lain-lain	Rp	-																													
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp	-																													
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-																													
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)	Rp	-																													
5. Sanksi Administrasi berupa kenaikan pasal 77 ayat (3)	Rp	-																													
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5)	Rp	-																													
PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)																															
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatangan <u>Nama Jabatan Penandatangan</u> NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)																															

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SKPDN

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir			
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :		
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh tempo :		
Nama Wajib Pajak :		NPWPD :		
Alamat :		NOPD :		
Nama Usaha :				
Alamat Usaha :				
Keterangan :				
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :				
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp -
Jumlah			Rp -	Rp -
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1. Dasar Pengenaan			Rp -	
2. Pajak yang terhutang			Rp -	
3. Kredit Pajak				
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp -	
b. Setoran yang dilakukan			Rp -	
c. Lain-lain			Rp -	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)			Rp -	
4. Jumlah yang masih harus dibayar			Rp -	
Dengan Huruf :				
Tempat, Tanggal Bulan Tahun				
Jabatan Penandatangan				
Nama Jabatan Penandatangan				
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)				

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR			
Nomor	:	Tanggal Penerbitan	:
Masa Pajak/Tahun Pajak	:	Tanggal Jatuh Tempo	:
Nama Wajib Pajak	:	NPWPD	:
Alamat	:	NOPD	:
Nama Usaha	:		
Alamat Usaha	:		
Keterangan	:		
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
Rekening Pajak	:		
Jenis Pajak	:		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar Pengenaan		Rp	
2. Pajak yang terhutang		Rp	
3. Kredit Pajak			
a. Setoran yang dilakukan	Rp	-	
b. Lain-lain	Rp	-	
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak	Rp	-	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp	
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga	Rp	-	
b. Kenaikan	Rp	-	
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)		Rp	
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang		Rp	
Dengan Huruf :			
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan			
<u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)			

HERI AMALINDO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR STPD

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir																					
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH																						
Nomor : Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																					
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : Keterangan :	NPWPD : NOPD :																					
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :																						
<table><tr><th>No</th><th>Rekening Pajak</th><th>Jenis Pajak</th><th>Pajak Terhutang (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp -</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp -</td></tr></table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)				Rp -	Jumlah			Rp -									
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)																			
			Rp -																			
Jumlah			Rp -																			
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																						
<table><tr><td>1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Denda Pasal 70 karena tidak melakukan pelaporan SPTPD.</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> b. Bunga Pasal 78 ayat (4) karena pajak terutang pada SKPD, SPPT, dan SPTPD kurang atau tidak dibayar setelah jatuh tempo.</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> c. Bunga Pasal 78 ayat (5) karena SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> d. Jumlah Sanksi Administrasi</td><td></td><td>Rp -</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td><td></td><td>Rp -</td></tr></table>		1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar	Rp	-	2. Sanksi Administrasi			a. Denda Pasal 70 karena tidak melakukan pelaporan SPTPD.	Rp	-	b. Bunga Pasal 78 ayat (4) karena pajak terutang pada SKPD, SPPT, dan SPTPD kurang atau tidak dibayar setelah jatuh tempo.	Rp	-	c. Bunga Pasal 78 ayat (5) karena SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.	Rp	-	d. Jumlah Sanksi Administrasi		Rp -	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)		Rp -
1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar	Rp	-																				
2. Sanksi Administrasi																						
a. Denda Pasal 70 karena tidak melakukan pelaporan SPTPD.	Rp	-																				
b. Bunga Pasal 78 ayat (4) karena pajak terutang pada SKPD, SPPT, dan SPTPD kurang atau tidak dibayar setelah jatuh tempo.	Rp	-																				
c. Bunga Pasal 78 ayat (5) karena SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.	Rp	-																				
d. Jumlah Sanksi Administrasi		Rp -																				
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)		Rp -																				
Dengan Huruf :																						
PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)																						
(Tempat, Tanggal Bulan Tahun) Jabatan Penandatangan Nama Jabatan Penandatangan NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)																						

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

